

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Kota Kisaran

Yohana Ariska Putri Nst¹, Nurlaila²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Kisaran, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran, menganalisis kesesuaian pengelolaan anggaran dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari dokumen dan wawancara dengan staf BPJS Kesehatan Kota Kisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran telah dilakukan secara baik dan sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari tercapainya tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan juga tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam anggaran. Pengelolaan anggaran juga dilakukan secara terbuka dan transparan dengan menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh publik dan pihak yang berkepentingan. Namun, BPJS Kesehatan Kota Kisaran masih perlu melakukan peningkatan pada pengawasan pengelolaan anggaran serta mengembangkan sistem pengelolaan anggaran yang lebih modern dan efektif, seperti penggunaan teknologi informasi. Implementasi saran-saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pengelolaan Anggaran*

Copyright (c) 2023 Yohana Ariska Putri Nst

✉ Corresponding author :

Email Address : yohanaariskanasution@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya good public dan good governance.

Sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (2) bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efektif (Sari,

2018). Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari proses pembuatan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintahan dan penyusunan anggaran dalam rangka waktu satu tahun. Efektivitas pengelolaan anggaran tersebut juga memiliki dampak terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya anggaran kita dapat mengestimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dapat dinyatakan dalam ukuran finansial. Proses pengelolaan anggaran merupakan proses penyusunan rencana jangka panjang, yang dalam perusahaan berorientasi laba, pemilihan rencana didasarkan atas dampak rencana kerja tersebut terhadap laba (Suprpto, 2021). Sistem penganggaran memiliki peran yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Keberhasilan anggaran untuk mendukung tujuan perusahaan dapat ditentukan dari sejauh manakah anggaran dapat memenuhi fungsi-fungsinya. Hal ini tidak terlepas dari sistem penganggaran yang direncanakan dengan baik. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah sistem penganggaran yang diterapkan perusahaan dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan dengan maksimal (Yanti, 2023).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang bertugas mengelola program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. BPJS Kesehatan didirikan pada 1 Januari 2014 sebagai pengganti dua lembaga sebelumnya yaitu Asuransi Kesehatan Masyarakat (Askes) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Paramita, 2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memperoleh layanan kesehatan yang memadai, terjangkau, dan berkualitas (Rahma, 2023). Untuk mencapai tujuan ini, BPJS Kesehatan membutuhkan pengelolaan anggaran yang efektif. Pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan penting dilakukan untuk memastikan kelangsungan program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan (Djamhari, 2020).

Sebaik apapun perencanaan pengelolaan yang disusun oleh BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan apa-apa jika dalam pelaksanaan dan tahap pengendaliannya tidak berjalan dengan baik. Dalam rangka penggunaan anggaran, kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan roda perusahaan, BPJS Kesehatan berusaha mewujudkan pengelolaan penganggaran yang baik melalui proses fungsi manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengelolaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian. Mengklasifikasikan anggaran belanja ke dalam klasifikasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan tepat agar pengelolaan anggaran dan pelaksanaan anggaran tercipta dan terlaksana dengan baik. Dalam setiap belanja BPJS Kesehatan menetapkan target capaian kinerja, baik dalam konteks daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan memperjelas efektivitas penggunaan anggaran. Program kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan (Kekeu, 2019).

Salah satu wilayah di Indonesia yang juga memiliki BPJS Kesehatan adalah Kota Kisaran. Kota Kisaran adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Sebagai bagian dari negara Indonesia, Kota Kisaran juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya, termasuk dalam

bidang kesehatan. BPJS Kesehatan Kota Kisaran merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Kisaran. Saat ini, BPJS Kesehatan Kota Kisaran telah melayani sekitar 200.000 peserta dan memiliki lebih dari 50 fasilitas kesehatan mitra yang tersebar di wilayah Kota Kisaran (BPJS Kesehatan, 2021).

Dalam pengelolaan anggaran, BPJS Kesehatan Kota Kisaran mengalami beberapa permasalahan seperti penyaluran anggaran yang tidak tepat waktu, penggunaan anggaran yang kurang efektif, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kota Kisaran kepada masyarakat.

BPJS Kesehatan Kota Kisaran juga telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Beberapa upaya tersebut antara lain penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data, kerjasama dengan fasilitas kesehatan mitra dalam meningkatkan kualitas pelayanan, serta pemberian insentif bagi tenaga medis yang berprestasi. Dapat diketahui bahwa lembaga ini memiliki potensi dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat (Putri, 2021).

Tabel 1. Laporan Anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran Pertahun 2020-2022

Tahun	Anggaran Yang Teralokasikan Pertahun
2020	362,6 juta
2021	392,9 juta
2022	433,4 juta

Sumber : BPJS Kesehatan Kota Kisaran

Dalam periode tahun 2020-2022 anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada BPJS Kesehatan Kota Kisaran mengalami kenaikan yang signifikan seiring dengan peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terus meningkat. Anggaran yang diberikan setiap tahun digunakan untuk membiayai pembiayaan jaminan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan serta untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19. Selain itu juga digunakan untuk kunjungan di puskesmas dan rawat jalan di rumah sakit.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti Dwi Lestari yang membahas tentang “ Analisis Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan Di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan masih ada kekurangan dalam pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan di Kabupaten Tegal, khususnya dalam hal pengalokasian dan penggunaan dana di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan dan monitoring, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengelola keuangan, serta kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung (Lestari, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat membahas tentang “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan Di Kota Bandung ”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kepemimpinan yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, dan pengawasan yang efektif sangat penting dalam memastikan pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan yang efektif (Hidayat, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Madinda Puspita Sari tentang “ Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan di Lima Kota Besar Indonesia ”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan di lima kota besar Indonesia bervariasi. Dalam aspek ketercapaian tujuan, beberapa kota berhasil mencapai target pelayanan kesehatan yang ditetapkan, sementara kota lain masih menghadapi kendala dalam mencapai tujuan tersebut (Sari M. P., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahayu tentang “ Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan: Studi Kasus pada Tiga Kabupaten di Jawa Tengah ”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan di ketiga kabupaten tersebut relatif rendah. Terdapat beberapa masalah yang menghambat efektivitas pengelolaan anggaran, antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai tata kelola anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi secara periodik (Rahayu, 2018).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sutrisno tentang “ Pengaruh Faktor-Faktor Internal dan Eksternal terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan di Daerah Perkotaan ”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor internal seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kebijakan yang jelas, dan dukungan pemerintah daerah yang kuat memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan di daerah perkotaan. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti regulasi dan peraturan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Sutrisno, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Dewi tentang “ Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan melalui Penggunaan Teknologi Informasi ”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan anggaran. Implementasi sistem informasi keuangan dan pelaporan anggaran secara elektronik memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi (Dewi, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin Susanto tentang “ Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BPJS Kesehatan: Studi Kasus di Beberapa Pusat Pelayanan Kesehatan ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran BPJS Kesehatan di beberapa pusat pelayanan kesehatan masih memiliki beberapa kendala. Tingkat efektivitas penggunaan anggaran masih belum optimal, terutama dalam hal pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sebenarnya (Susanto, 2018).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arif Setiawan tentang “ Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara ”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara (Setiawan, 2020).

Dari hasil pra-riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya menekankan permasalahan pengalokasian dan penggunaan dana di fasilitas kesehatan, faktor-faktor apa saja yang mendukung, bagaimana sistem informasi manajemen yang baik bagi BPJS Kesehatan, bagaimana cara mengelola anggaran yang baik dan menghasilkan pengeluaran yang efisien, kurangnya pengawasan dan evaluasi secara periodik, apa saja faktor-faktor internal dan eksternal terhadap

efektivitas pengelolaan anggaran (BPJS) Kesehatan di daerah perkotaan, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan, masih lemahnya pengendalian anggaran dan pengawasan internal yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan anggaran, dan meningkatkan transparansi maupun akuntabilitas agar lebih bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran dengan efektif. Anggaran yang dikelola oleh BPJS Kesehatan harus digunakan secara optimal agar dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pengelolaan anggaran yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki BPJS Kesehatan digunakan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Efektivitas pengelolaan anggaran juga akan berdampak pada keberlanjutan program jaminan kesehatan serta pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat. Dalam prakteknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan dalam pengelolaan anggaran. Tantangan tersebut antara lain meliputi pengendalian biaya kesehatan yang meningkat, pertumbuhan kepesertaan yang pesat, kompleksitas sistem pembayaran, serta kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (Paramita A. , 2019).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan di Kota Kisaran. Penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan anggaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan yang berguna bagi BPJS Kesehatan Kota Kisaran dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dengan demikian, artikel ini akan membahas efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan di Kota Kisaran, dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan anggaran dan pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa depan.

Efektivitas

Pengertian Efektivitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata efektif (kata sifat). Sementara itu efektivitas memiliki pengertian “ keefektifan”. Keefektifan adalah keadaan berpengaruh “hal berkesan, kemajuan kemujaban, keberhasilan(tentang usaha, tindakan). Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa inggris “effective” yang telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil guna”. Efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau di kehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam konteks bisnis, efektivitas dapat diukur dari seberapa baik suatu perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya, seperti meningkatkan pendapatan atau memperluas pangsa pasar. Untuk meningkatkan efektivitas, perusahaan perlu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, seperti tenaga kerja, teknologi, dan modal. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan strategi bisnis yang telah

ditetapkan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis (Amstrong & Murlis, 2021).

Menurut Robbins efektivitas adalah tingkat mencapai tujuan yang diinginkan atau mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas diukur dengan melihat seberapa jauh organisasi atau individu telah mencapai tujuan mereka secara efisien, yaitu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam konteks manajemen, efektivitas seringkali dianggap sebagai kunci keberhasilan suatu organisasi (Robbins, 2017). Dalam hal ini, efektivitas diukur dengan melihat seberapa baik organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa besar kontribusi organisasi dalam mencapai tujuan dan kepentingan stakeholders-nya. Dalam hal ini, efektivitas biasanya diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti angka penjualan, tingkat kepuasan pelanggan, atau profitabilitas organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

1. Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pengeluaran keuangan organisasi atau individu. Dalam pengelolaan anggaran, sumber daya keuangan diatur dan dikontrol dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Arti, 2020). Pentingnya pengelolaan anggaran terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan organisasi atau individu untuk mengelola keuangan mereka dengan baik dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik (Lubis, 2021). Dengan pengelolaan anggaran yang baik, organisasi atau individu dapat mengelola sumber daya keuangan mereka dengan efisien dan efektif, memperkirakan kebutuhan keuangan di masa depan, dan memperhitungkan risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan keuangan.

Pengelolaan anggaran juga penting dalam menghindari masalah keuangan seperti pengeluaran yang berlebihan, kekurangan uang, dan hutang yang berlebihan. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, organisasi atau individu dapat menghindari masalah keuangan ini dan mempertahankan stabilitas keuangan jangka panjang (Mubyarto, 2021). Dalam konteks organisasi, pengelolaan anggaran juga penting untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, organisasi dapat menunjukkan bahwa mereka dapat mengelola sumber daya keuangan mereka dengan baik dan memiliki rencana yang jelas untuk mencapai tujuan keuangan mereka (Nurlaila, 2017). Pengelolaan anggaran dilakukan secara fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi organisasi. Pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada pengendalian pengeluaran,

namun juga memperhatikan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran (Rosmini, 2021).

Dalam kesimpulannya, pengelolaan anggaran adalah suatu proses yang penting bagi organisasi atau individu untuk mengelola sumber daya keuangan mereka dengan baik, mempertahankan stabilitas keuangan jangka panjang, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan dilakukan dengan situasi yang wajar dimana landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian (Bi Rahmani, 2016).

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian untuk BPJS Kesehatan Kota Kisaran. Waktu penelitian dilakukan di bulan Maret 2023 diawali dengan pencarian data-data tersebut sampai selesai.

c. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan Objek dalam penelitian ini adalah bahan yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti (Budi, 2016). Subjek dalam penelitian ini adalah tata kelola bagian anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah kantor BPJS Kesehatan Kota Kisaran.

d. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen-dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini (Yusuf, 2017).

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian (Maulida, 2020). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Interview/wawancara. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber

utama adalah Bapak Lukman sebagai tata kelola bagian anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran.

2. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian. Mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode arsip (dokumentasi). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa berupa dokumen resmi Laporan Tahunan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kota Kisaran dari tahun 2020-2022.

f. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Hartono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan pantauan lapangan yang dilakukan penulis, dapat dideskripsikan bagaimana cara BPJS Kesehatan Kota Kisaran mengelola anggaran yang sudah diterima dari berbagai sumber, seperti iuran peserta, subsidi pemerintah, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh hasil mengenai pengelolaan anggaran dan efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran. Tata kelola bagian anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran, pak Lukman sebagai narasumber pertama mengatakan bahwa sejauh ini BPJS Kesehatan sudah cukup efektif dalam pengelolaan anggaran yang diterima. Berikut penuturan hasil wawancaranya.

“ Baik, disini saya akan menjelaskan bagaimana BPJS Kesehatan mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Sebelum nya BPJS bertanggungjawab penuh untuk mengelola anggaran yang diterima dari berbagai sumber, seperti iuran peserta, subsidi pemerintah, dan sumber lainnya. Anggaran yg diterima BPJS digunakan untuk membiayai berbagai program kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bagi peserta, pengembangan sistem administrasi dan manajemen, serta program-program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Untuk cara pengelolaan nya sendiri biasanya kami mengalokasikan anggaran tersebut untuk pembiayaan jaminan kesehatan, jadi BPJS Kesehatan menyalurkan anggaran yang diterima untuk membayar biaya pelayanan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan seperti biaya rawat inat, operasi atau pengobatan. BPJS juga melakukan pengendalian biaya dengan menetapkan tarif pelayanan kesehatan yang wajar dan memastikan bahwa peserta hanya menerima pelayanan kesehatan yg diperlukan dan tepat. Kami juga sudah berusaha menyalurkan anggaran secara tepat waktu. Dan kami juga transparansi dalam melakukan pengelolaan anggaran. Sejauh ini cara kami dalam mengelola anggaran tersebut sudah cukup optimal karena secara keseluruhan kami mengelola anggaran yg diterima dengan hati-hati dan memastikan bahwa setiap dana tersebut digunakan secara efektif untuk membiayai jaminan kesehatan bagi peserta. Dan sampai saat ini kami juga masih meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran tersebut. Kami juga melakukan berbagai upaya, seperti mengoptimalkan sistem administrasi dan manajemen, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta melakukan kontrol biaya dan penghematan. Kami juga masih melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap program-program yg

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program. Dikarenakan BPJS Kesehatan merupakan program yg sangat besar dan kompleks, masih mungkin terdapat kelemahan dalam pengelolaan anggaran yg diterima. Jadi sampai saat ini pun kami masih secara terus-menerus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program yg dijalankan, serta melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran tersebut. "

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran secara umum sudah cukup efektif. Namun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan Kota Kisaran perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala serta melakukan upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

2. Pembahasan

Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Kisaran memberikan gambaran tentang kondisi BPJS Kota Kisaran dalam mengelola anggaran yang sudah diberikan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa hasil pembahasan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran telah dilakukan secara baik dan efektif. Hal ini terlihat dari tercapainya tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan juga tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam anggaran. Pengelolaan anggaran juga dilakukan secara terbuka dan transparan dengan menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh publik dan pihak yang berkepentingan. Selain itu, BPJS Kesehatan Kota Kisaran juga menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan dengan tepat dan efisien.

Tabel 2

Laporan Anggaran Pemanfaatan Program BPJS Kesehatan Kota Kisaran Pertahun 2020-2022

Tahun	Anggaran	Pemanfaatan
2020	146,1 juta	Kunjungan di FKTP (Puskesmas/ Dokter Praktik Perorangan/ Klinik Pratama)
	69,6 juta	Kunjungan di Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit
	8,2 juta	Kasus Rawat Inap Rumah Sakit
	137,8 juta	Kunjungan Kesehatan
2021	150,3 juta	Kunjungan di FKTP (Puskesmas/ Dokter Praktik Perorangan/ Klinik Pratama)
	72,8 juta	Kunjungan di Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit
	9,0 juta	Kasus Rawat Inap Rumah Sakit
	157,3 juta	Kunjungan Kesehatan
2022	152,1 juta	Kunjungan di FKTP (Puskesmas/ Dokter Praktik Perorangan/ Klinik Pratama)
	84,7 juta	Kunjungan di Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit
	11,0 juta	Kasus Rawat Inap Rumah Sakit

159,8 juta

Kunjungan Kesehatan

Sumber : **BPJS Kesehatan Kota Kisaran**

Dapat dilihat pada data anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada BPJS Kesehatan Kota Kisaran dalam pemanfaatan program yang dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2022. Dalam periode tersebut, anggaran yang diberikan mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi peserta program JKN, kenaikan tarif pelayanan kesehatan, dan kenaikan biaya operasional. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan Kota Kisaran masih perlu melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan anggaran.

Untuk meningkatkan pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, BPJS Kesehatan Kota Kisaran perlu memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh tim internal maupun tim eksternal. Kedua, BPJS Kesehatan Kota Kisaran perlu memperbaiki sistem pelaporan dan pengecekan data untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara tepat dan sesuai dengan rencana. Ketiga, BPJS Kesehatan Kota Kisaran perlu memperkuat partisipasi dari seluruh anggota organisasi dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar unit kerja dalam organisasi.

b. Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi. BPJS Kesehatan Kota Kisaran juga telah menggunakan teknik pengelolaan anggaran berbasis kinerja untuk mengukur pencapaian kinerja dan mempertimbangkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, BPJS Kesehatan Kota Kisaran juga melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan dengan baik.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran antara lain transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Dalam pengelolaan anggarannya, BPJS Kesehatan Kota Kisaran sudah cukup transparan dengan memberikan informasi dan dokumen tentang pengelolaan anggaran kepada publik dan pihak yang berkepentingan. BPJS Kesehatan Kota Kisaran juga telah mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangannya kepada publik dan pihak yang berkepentingan. Selain itu, BPJS Kesehatan Kota Kisaran juga melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa teknik pengelolaan anggaran yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran adalah penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran partisipatif. Penganggaran berbasis kinerja dapat membantu BPJS Kesehatan Kota Kisaran untuk mengukur kinerja berdasarkan hasil yang dicapai dan mempertimbangkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penganggaran partisipatif dapat melibatkan partisipasi dari seluruh anggota organisasi dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran. Dengan demikian, teknik pengelolaan anggaran

tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran.

Pada penelitian ini, efektivitas pengelolaan anggaran diukur dengan mengamati sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Ditemukan bahwa BPJS Kesehatan Kota Kisaran telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari implementasi program-program kesehatan yang dilakukan dan hasil yang dicapai dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan anggaran yang efektif ditandai dengan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. BPJS Kesehatan Kota Kisaran menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan yaitu memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, dan pengurangan jumlah masyarakat yang tidak tercover oleh jaminan kesehatan.

Terdapat berbagai hasil penelitian yang sejalan sebagai berikut : hasil penelitian Yuniarti Dwi Lestari (Lestari, 2018), menyebutkan bahwa pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan di Kabupaten Tegal masih belum efektif, terutama dalam hal pengalokasian dan penggunaan dana di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Hasil penelitian Ahmad Hidayat (Hidayat, 2020), berpendapat bahwa faktor-faktor seperti kepemimpinan yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, dan pengawasan yang efektif mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan di Kota Bandung.

Hasil penelitian Madinda Puspita Sari (Sari M. P., 2018), mengatakan bahwa ada beberapa kota yg sudah berhasil mengelola anggaran dengan baik dan menghasilkan pengeluaran yang efisien, sedangkan beberapa kota lain masih perlu perbaikan dalam hal penggunaan anggaran.

Hasil penelitian Siti Rahayu (Rahayu, 2018), menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan di tiga Kabupaten di Jawa Tengah, masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan pengawasan dan evaluasi, serta penguatan tata kelola anggaran yang baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sutrisno (Sutrisno, 2018), mengatakan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal seperti sumber daya manusia, kebijakan yang jelas, dukungan pemerintah dan juga regulasi sangat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.

Hasil penelitian Rahma Dewi (Dewi, 2020), menyebutkan bahwa teknologi informasi dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna anggaran dalam memantau dan mengontrol penggunaan anggaran. Selain itu juga menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan sosial.

Hasil penelitian Arifin Susanto (Susanto, 2018), berpendapat bahwa pelaksanaan anggaran BPJS Kesehatan di beberapa pusat pelayanan kesehatan masih memiliki beberapa kendala, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan anggaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Setiawan (Setiawan, 2020), mengatakan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara sudah lebih meningkat dari sebelumnya baik dalam keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, dan serta pertanggung jawaban dalam penggunaan anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan di berbagai wilayah memiliki tantangan yang berbeda. Namun, masing-masing menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung, sistem informasi manajemen yang baik, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam mencapai efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan.

SIMPULAN

Pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran sudah cukup efektif, namun masih perlu adanya peningkatan pada beberapa aspek, seperti pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kebijakan dan pedoman pengelolaan anggaran yang jelas, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat. Selain itu, teknik pengelolaan anggaran yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan Kota Kisaran meliputi penganggaran berbasis kinerja, penganggaran partisipatif, dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, diharapkan BPJS Kesehatan dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Referensi :

- AMSTRONG, M., & MURLIS, H. (2021). *REWARD MANAGEMENT : A HANDBOOK OF REMUNERATION STRATEGY AND PRACTICE*. KOGAN PAGE.
- Arti, T. (2020). Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Bos Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Di Sma Negeri 21 Gowa. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 5-7.
- Bi Rahmani, N. A. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- BPJS Kesehatan. (2021). *Profil BPJS Kesehatan 2020*. Retrieved from <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/8133f09d-8218-4bdc-9e83-cb38a7d16e91/Profil%20BPJS%20Kesehatan%202020.pdf>
- Budi, T. (2016). *Riset Modelig: Teori, Konsep dan Prosedur Melakukan Penelitian*. Pekanbaru: AdhDhuha Insitute.
- Dewi, R. (2020). Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan melalui Penggunaan Teknologi Informasi . *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(2), 243-256.
- Djamhari, E. d. (2020). *Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mengapa Dan Bagaimana Mengatasinya*. Jakarta: PRAKARSA.
- Hartono, M. J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Hidayat, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 95-116.
- Kekeu, L. (2019). Analisis Iuran dan Badan Kesehatan Dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan; Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*.
- Lestari, Y. D. (2018). Analisis Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 905-932.
- Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234-8245.
- Maulida. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam*, 21(2).
- Mubyarto, N. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PERSPEKTIF KEUANGAN PUBLIK ISLAM DI

- KABUPATEN TEBO (Studi Kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo 2020). *Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Nurlaila. (2017). *Akuntansi Syariah*. Medan: MADENATERA.
- Paramita, A. (2019). Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Keuangan Negara. *Repository Universitas Jember*.
- Paramita, A. D. (2019). *Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Perspektif Keuangan Negara*. Jember: Universitas Jember.
- Putri, N. (2021). *Analisis Penyebab Defisit Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- R. S. (2017). *Manajemen Jilid 2*.
- Rahayu, S. (2018). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan: Studi Kasus pada Tiga Kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 6 (2), 85-95.
- Rahma, T. F. (2023). Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan terhadap Minat Peserta BPJS Kesehatan Menggunakan Faskes Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah AEK Kanopan. *JIKEM : Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*, 3(1), 1227-1275.
- Rosmini. (2021). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Sari, D. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *KINERJA* 15.1, 38-43.
- Sari, M. P. (2018). Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan di Lima Kota Besar Indonesia. *Jurnal HAM*.
- Setiawan, A. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan* 6.2.
- Suprpto, H. (2021). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 50-63.
- Susanto, A. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BPJS Kesehatan: Studi Kasus di Beberapa Pusat Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*.
- Sutrisno, A. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Internal dan Eksternal terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran BPJS Kesehatan di Daerah Perkotaan. *Indonesian Journal of Agricultural Economics* 3.1.
- Yanti, N. (2023). Analisis Peran Perangkat Desa untuk Meningkatkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara). *JIKEM : Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen* 3(1), 138-173.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.